

DPR Desak PT Wika Jelaskan Temuan BPK

KOMISI VI DPR RI mendesak PT Wijaya Karya (Wika) segera menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan banyak proyek bermasalah yang dikerjakan PT Wika dan berindikasi merugikan negara dalam jumlah besar.

"Berdasarkan laporan BPK Semester I 2010, ditemukan bahwa PT Wika, selaku tim perencana proyek Trade Centre Mall di Surabaya lalai tidak membuat kontrak yang mengikat secara hukum dan menjamin hak perusahaan, sehingga menyulitkan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa," kata anggota Komisi VI DPR Hayani Isman kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Selain itu, Hayani juga membocorkan sejumlah proyek bermasalah PT Wika lainnya.

"Wika juga melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan layang dan Pasteur-Cikapayang-Surapati (Pasupati) yang mengakibatkan rencana biaya pekerjaan yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga Wika dirugikan Rp10,45 miliar dan terdapat piutang senilai Rp106,63 miliar dan 11,49 juta dolar AS pada tujuh proyek yang berpotensi tidak tertagih," katanya.

Hayani menegaskan, sebagai BUMN Karya, Wika tidak sepatutnya melakukan kelalaian seperti disebutkan

dalam laporan BPK semester I tahun 2010.

"Pasalnya, selaku perusahaan yang sudah go publik dan terbuka, mereka mempunyai tim yang profesional sehingga kesalahan ataupun kelalaian itu tidak perlu terjadi. Namun kalau memang ada permainan, wajar saja terjadi kelalaian tersebut," kata Hayani.

Menurut politikus Partai Golkar ini, dirinya sudah mempertanyakan hal tersebut pada PT Wika dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan 14 Badan Usaha Milik Negara Karya (BUMN Karya) Bidang Konstruksi di Gedung DPR, Senin (7/2) lalu.

"Saya sudah menanyakan kepada

mereka, tapi sayang saat itu belum dapat penjelasan karena rapat harus diakhiri mengingat waku sudah malam. Untuk itu, saya mendesak Wika segera menjelaskan bagaimana tindak lanjut dari temuan BPK tersebut dan juga menjelaskan apa yang telah dilakukan menyikapi masalah kerugian dan piutang PT Wika tersebut," tegasnya.

Berdasarkan laporan BPK semester I tahun 2010, ditemukan bahwa Wika sebagai tim perencana proyek Trade Centre Mall di Surabaya, lalai tidak membuat kontrak yang mengikat secara hukum dan menjamin hak perusahaan, sehingga menyulitkan dalam menyelesaikan sengketa. *(ant)*